

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PONDOK KELOR KECAMATAN SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG

Junaedi¹, Doddy Mulyono²

^{1,2}Universitas Yuppentek Indonesia

Email: ¹Junaedijihan15@gmail.com, ²doddymulyono2020@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor, dengan fokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta dampak dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada para informan yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung dalam pembangunan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan fisik yang dilakukan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dikelola dengan baik melalui pengawasan yang transparan, meskipun terdapat tantangan dalam hal pemenuhan anggaran dan waktu yang terbatas. Pembangunan fisik yang dilakukan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dampak jangka panjang dari pembangunan ini antara lain meningkatnya kualitas hidup masyarakat, aksesibilitas yang lebih baik, serta kemudahan dalam mengakses layanan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam manajemen proyek. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola desa dan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan pembangunan fisik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan fisik, Desa Pondok Kelor, partisipasi masyarakat, infrastruktur, perencanaan pembangunan.

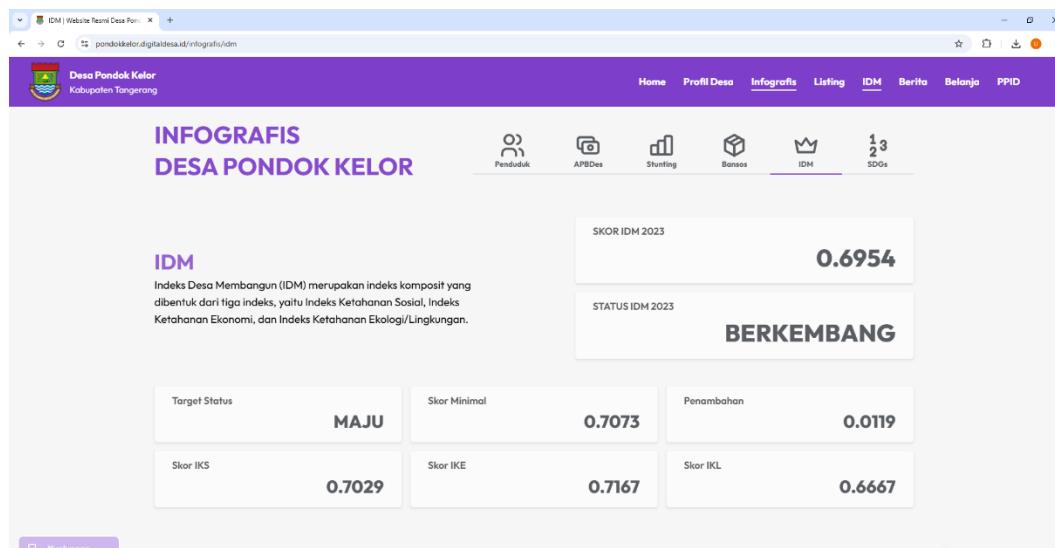
Abstract

This study aims to analyze the physical development process in Pondok Kelor Village, focusing on the planning, implementation, and the impact of these developments on the community. A qualitative approach with in-depth interviews was conducted with informants, including village officials, community leaders, and residents directly involved in the development process. The data collected was then analyzed to describe how the community participated in the planning, implementation, and monitoring of physical development in the village. The findings of the study indicate that the physical development planning process in Pondok Kelor Village is participatory, conducted through village meetings that involve the community in determining development priorities. The implementation of development is well-managed with transparent supervision, though challenges such as funding constraints and limited time have been encountered. The physical infrastructure improvements, including roads, bridges, and public facilities, have positively impacted the mobility of residents and economic activities. The long-term effects of this development include improved quality of life, better accessibility, and enhanced access to public services. Based on these findings, this study recommends increasing community involvement in all stages of development, particularly in monitoring and maintaining infrastructure. Additionally, it is important to strengthen transparency and accountability in budget management and improve the capacity of village officials in project

management. This research is expected to serve as a reference for village administrators and relevant parties in designing and implementing more effective and sustainable physical development. **Keywords:** Physical development, Pondok Kelor Village, community participation, infrastructure, development planning.

PENDAHULUAN

Desa Pondok Kelor yang berada di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang memiliki Indeks Desa Membangun sebesar 0,694 Tahun 2023 artinya statusnya berkembang.



Gambar 1.1. Indeks Desa Membangun Desa Pondok Kelor

Sumber: <https://pondokkelor.digitaldesa.id/infografis/idm>

Status Indeks Desa Membangun yang berstatus berkembang juga tak terlepas dari peran Kepala Desa Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Kepala desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan fisik. Secara umum, masyarakat Desa Pondok Kelor yang berada di Kabupaten Tangerang sangat membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur guna menunjang kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga mulai menyadari pentingnya kebutuhan dasar terkait pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembekalan berupa pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai urgensi pembangunan desa. Melalui program-program pemerintahan desa yang berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan di lingkungan tempat tinggal mereka,

masyarakat diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam menjaga, mempertahankan, serta meningkatkan kualitas pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan penulis di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, diketahui bahwa jumlah penduduk desa tersebut mencapai 4.282 jiwa dengan 923 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka peran kepala desa menjadi krusial dalam mengelola pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi desa. Beberapa program pembangunan yang telah dijalankan mencakup perbaikan infrastruktur jalan desa serta peningkatan fasilitas kantor desa. Seluruh program tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik. Pemerintah Desa Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur telah melaksanakan program-program tersebut dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah Tugas Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Desa Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang?

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, menurut Cross (dalam Sukardi, 2005:1), evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu tujuan telah tercapai. Sukardi (2005:1) menambahkan bahwa pengertian tersebut secara langsung menegaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi, memahami makna dari informasi tersebut, serta menyampaikannya kepada pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengetahui kondisi atau keadaan suatu objek dengan memanfaatkan instrumen yang berkaitan dengan indikator,

tujuan, serta manfaat dari objek yang dievaluasi. Evaluasi juga mencakup penyampaian informasi tersebut kepada para pemangku kepentingan.

Sementara itu, menurut Subarsono (2009:199), evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menilai tingkat kinerja dari suatu kebijakan. Metode evaluasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Input (masukan) merupakan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam suatu program atau kebijakan sebagai bahan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut. Input dapat berupa sumber daya, informasi, atau komponen lain yang menjadi dasar proses kebijakan.
2. Proses, yaitu kegiatan yang mencerminkan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi bentuk yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. Proses menunjukkan bagaimana kebijakan dijalankan atau diimplementasikan.
3. Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti berupa produk kebijakan, regulasi, layanan, atau program tertentu yang dihasilkan.
4. Outcame menunjukkan dampak atau hasil jangka panjang dari suatu kebijakan, yang muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Moekijat (2002:15), pelaksanaan tugas merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah "pelaksanaan" berasal dari kata dasar "laksana" yang memiliki arti perbuatan, sifat, atau ciri, kemudian diberi imbuhan "pe-" dan "-an" sehingga membentuk kata benda yang merujuk pada suatu proses pelaksanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 25, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa—atau sebutan lain yang sesuai dengan ketentuan daerah—yang dibantu oleh perangkat desa. Dalam konteks ilmu manajemen, pihak yang membantu pimpinan biasanya disebut staf. Staf profesional mengacu pada pegawai atau pejabat yang memiliki keahlian khusus, bertanggung jawab atas tugasnya, serta menunjukkan perilaku profesional dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya, dalam Pasal 26 undang-undang yang sama ditegaskan bahwa Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,

melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa berperan sebagai pendukung atau pembantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk menilai sejauh mana capaian tujuan pembangunan, khususnya dalam bidang pembangunan fisik, telah terealisasi melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan dan menginterpretasikan makna berdasarkan perspektif subjek yang diteliti (Sugiyono, 2016:11). Sementara itu, pendekatan deskriptif mengacu pada upaya menggambarkan atau menguraikan objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang ada (Sugiyono, 2016:11).

Jenis penelitian ini bersifat evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu program, kebijakan, atau kegiatan telah dilaksanakan dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada model input, proses, output, dan outcome yang dikemukakan oleh Subarsono (2009:199).

PEMBAHASAN

Pondok Kelor adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Desa ini terbagi atas 16 Rukun Tetangga dan 4 Rukun Warga. Berdasarkan Data BPS Tahun 2024 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Luas Desa Pondok Kelor adalah 1,36 Km², jadi wilayah terkecil di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

Awal mula Desa Pondok Kelor berdiri atas hasil pemekaran dari Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, pada Tahun 1984. Desa Pondok Kelor berbatasan dengan: Sebelah Utara Desa Kiara Payung Kecamatan Pakuhaji, Sebelah Selatan Desa Kampung Kelor

Kecamatan Sepatan Timur, Sebelah Barat Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur dan Sebelah Timur Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur.

Sesuai dengan tabel dibawah bahwa Pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor Periode 2024-2025 antara Betonisasi Jalan Lingkungan di area RT.004/001 dan RT.001/004, hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan sedangkan Paving Blok di Jalan Lingkungan area Desa Pondok Kelor, Terdapat juga program bedah rumah tidak layak dan terakhir Program Grebek Posyandu sebagai pelayanan Kesehatan gratis untuk 720 balita termasuk pendirian posyandu di lingkungan Desa Pondok kelor

Tabel 1. Pembangunan Fisik Desa Pondok Kelor 2024-2025

No.	Jenis Kegiatan Pembangunan	Deskripsi
1	Betonisasi Jalan Lingkungan	Pembangunan jalan beton di RT 04/01 dan RT 01/04 untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan.
2	Paving Blok Jalan Lingkungan	Pemasangan paving blok untuk perbaikan infrastruktur jalan lingkungan.
3	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Renovasi 10 unit rumah warga yang tidak layak huni untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal.
4	Program Grebek Posyandu	Pelayanan kesehatan gratis untuk 720 balita, ibu hamil, dan lansia guna menekan angka stunting.

Sumber: Pemerintah Desa Pondok Kelor, 2025

Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama data, sebagaimana dijelaskan dalam bagian pembahasan berikut ini:

1. Input (Masukan)

Input merupakan elemen awal dalam suatu sistem yang berperan sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Menurut Subarsono (2009:199), unsur input dapat diartikan sebagai segala hal yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses, termasuk di dalamnya sumber daya manusia, anggaran, waktu, informasi, serta sarana dan prasarana yang diperlukan guna mencapai tujuan suatu program. Evaluasi pada tahap input

bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, input dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang terkait penyelenggaraan pembangunan fisik, mencakup beberapa aspek penting: perencanaan, sumber daya manusia, anggaran, bahan dan peralatan, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak M. Muhasan, diketahui bahwa proses perencanaan pembangunan fisik di desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan staf desa melalui musyawarah. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Abdul Rosid selaku Kepala Urusan Perencanaan yang menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan seperti paving blok, drainase, turap, dan betonisasi dirancang sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Urusan Keuangan, Bapak Ishak Bin Ompen, menjelaskan bahwa penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan meliputi biaya, bahan, dan tenaga kerja, yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Hal serupa disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Abdul Rozak, yang menekankan bahwa dalam perencanaan, masyarakat turut dilibatkan, meskipun dominasi pengambilan keputusan tetap berada pada tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Dari sisi anggaran, menurut Ibu Putri Nurkomalasari, Operator Desa, serta Bapak Muhamad Sidik selaku Kepala Seksi Kesejahteraan, dana pembangunan fisik bersumber dari Dana Desa yang penggunaannya berdasarkan hasil musyawarah. Warga masyarakat seperti Bapak Naim juga menyatakan bahwa meskipun dana telah direncanakan bersama, pelaksanaannya lebih banyak ditangani oleh perangkat desa.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan masih tergolong rendah atau terbatas. Beberapa warga seperti Bapak Alam dan Bapak Naim mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, yang dilibatkan dalam musyawarah hanya LPM dan Ketua BPD. Hal ini menimbulkan kesan eksklusivitas dalam pengambilan keputusan pembangunan yang idealnya bersifat inklusif.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di kantor Desa Pondok Kelor, terlihat bahwa sistem perencanaan masih dipengaruhi oleh kedekatan sosial antara aparatur

desa dan sebagian masyarakat. Dengan demikian, pelibatan masyarakat belum menyeluruh dan hanya terbatas pada kelompok tertentu yang dekat dengan perangkat desa.

2. Proses (Process)

Proses dalam evaluasi program merujuk pada aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output yang diharapkan, yaitu hasil atau capaian dari pelaksanaan suatu program. Evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan awal dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985), evaluasi proses dilakukan untuk menilai pelaksanaan program dalam kaitannya dengan desain, efisiensi, pelibatan stakeholder, serta keberlanjutan kegiatan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pondok Kelor, proses pelaksanaan pembangunan fisik mencakup penetapan rencana, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan kegiatan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Muhasan selaku Sekretaris Desa, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dimulai dengan penetapan rencana, dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Abdul Rosid, Kepala Urusan Perencanaan, yang menjelaskan bahwa bahan dan tenaga kerja telah disiapkan sebelum pekerjaan dimulai, dengan pengawasan rutin untuk menjamin kelancaran. Dalam praktiknya, masyarakat juga terlibat secara fisik dalam kegiatan pembangunan, meskipun keterlibatannya terbatas pada fase tertentu saja.

Dari sisi pengawasan, Bapak Abdul Rozak, Ketua BPD, menekankan pentingnya evaluasi berkala serta keterlibatan semua pihak untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Namun, menurut warga desa seperti Bapak Naim, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan belum merata, karena hanya beberapa tokoh tertentu yang diberikan peran aktif, sementara masyarakat umum tidak sepenuhnya dilibatkan.

Mengenai pengelolaan anggaran, Bapak Ishak Bin Ompen selaku Tim Pelaksana dan Kepala Urusan Keuangan menyatakan bahwa penggunaan dana desa mengikuti prosedur

yang telah ditetapkan dan dilakukan secara transparan, untuk menghindari penyimpangan dalam pengadaan bahan dan pembayaran tenaga kerja.

Dari segi sosialisasi, Bapak M. Muhasan menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui kepala dusun untuk menginformasikan rencana pembangunan. Namun, sosialisasi ini hanya dilakukan di dusun yang menjadi lokasi pembangunan, sehingga informasi tidak menjangkau seluruh masyarakat desa. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Abdul Rozak dan warga seperti Bapak Alam, yang menyatakan bahwa hanya masyarakat tertentu yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik, sedangkan masyarakat umum sering kali tidak diberi ruang partisipasi yang sama.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di lapangan sering menghadapi kendala, seperti keterlambatan akibat faktor cuaca atau kondisi pekerja, serta minimnya sosialisasi lintas wilayah dusun. Padahal, menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, proses sosialisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan desa dan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti musyawarah desa, papan informasi, sistem informasi desa berbasis website, dan media sosial.

3. Output (Keluaran)

Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu program, yang dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, sikap, perilaku, maupun kondisi fisik yang menjadi sasaran kegiatan. Dalam konteks pembangunan fisik di tingkat desa, output mencerminkan sejauh mana tujuan-tujuan pembangunan telah tercapai secara nyata, seperti terbangunnya infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat (Subarsono, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, secara umum output dari pelaksanaan pembangunan fisik telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan perhatian.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Muhasan selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa infrastruktur yang telah dibangun, seperti jalan desa dan fasilitas umum, telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam kemudahan akses dan

peningkatan kualitas hidup. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rosid, Kepala Urusan Perencanaan, yang mengakui bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dengan perencanaan, meskipun kualitas pekerjaan pada beberapa proyek perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih optimal.

Dari sudut pandang efisiensi penggunaan anggaran, Bapak Ishak Bin Ompen selaku Kepala Urusan Keuangan menilai bahwa meskipun anggaran pembangunan terbatas, dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, hasil yang diperoleh cukup sepadan. Hal ini mencerminkan adanya upaya optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan output maksimal.

Lebih lanjut, Bapak Abdul Rozak, Ketua BPD, menyoroti dampak pembangunan terhadap peningkatan mobilitas dan ekonomi masyarakat. Fasilitas umum yang lebih memadai serta akses jalan yang baik turut menunjang kegiatan sosial dan ekonomi warga. Warga desa seperti Bapak Naim dan Bapak Alam juga menyampaikan hal serupa, bahwa pembangunan fisik memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam aspek transportasi dan distribusi barang.

Namun demikian, dari sisi pemerataan pembangunan, masih terdapat ketimpangan antara dusun yang satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2024 hanya terdapat empat proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan, dan belum menjangkau seluruh wilayah desa secara merata. Dusun-dusun tertentu masih membutuhkan perhatian lebih untuk memperoleh pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, aspek keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga masih menjadi tantangan. Meskipun secara formal masyarakat diizinkan untuk ikut serta dalam mengawasi pembangunan, kenyataannya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan belum merata. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abdul Rosid, masyarakat sebenarnya diberi ruang untuk memberikan masukan dan teguran jika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), namun belum semua warga memahami atau menggunakan hak tersebut secara aktif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data lapangan, dapat disimpulkan bahwa output dari pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor

telah memberikan dampak yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya aksesibilitas, kemudahan dalam mobilitas warga, serta optimalisasi penggunaan fasilitas umum. Akan tetapi, efektivitas pembangunan dapat lebih ditingkatkan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah dusun, peningkatan kualitas hasil fisik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

4. Outcome (Dampak Jangka Panjang)

Menurut Subarsono (2005), outcome merupakan hasil dari suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut. Outcome mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan dalam jangka menengah hingga jangka panjang dan merupakan ukuran sejauh mana hasil yang dicapai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan kata lain, outcome tidak hanya sekadar menilai tercapainya produk atau output dari suatu program, tetapi juga mengukur dampak nyata dan berkelanjutan dari program tersebut terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di desa tersebut memberikan dampak jangka panjang yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa pembangunan fisik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas, kegiatan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat desa.

Sekretaris Desa Pondok Kelor, Bapak M. Muhasan, menyatakan bahwa pembangunan fisik yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mempermudah mobilitas warga. Beliau juga menyampaikan harapannya bahwa pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Urusan Perencanaan, Bapak Abdul Rosid, yang menjelaskan bahwa pembangunan fisik tidak hanya meningkatkan kondisi infrastruktur desa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan adanya akses jalan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian serta memperoleh kebutuhan pokok, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Dari sisi sosial, pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor juga memberikan dampak positif. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Abdul Rozak, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum telah mempererat hubungan sosial antarwarga, meningkatkan frekuensi interaksi, serta menciptakan rasa kebanggaan warga terhadap desa mereka.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh masyarakat, salah satunya adalah Bapak Alam, warga Desa Pondok Kelor, yang menilai bahwa pembangunan fisik memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Beliau menyatakan bahwa kondisi infrastruktur yang membaik memberikan pengaruh positif terhadap kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi outcome dari pembangunan, antara lain: keterlibatan masyarakat yang masih terbatas, kurangnya sosialisasi program pembangunan, lemahnya pengawasan dari masyarakat, serta pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah desa. Faktor cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan observasi menunjukkan bahwa indikator outcome dari pelaksanaan pembangunan fisik oleh pemerintah desa berada dalam kategori cukup baik. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas infrastruktur, akses yang lebih mudah, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan merata, dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi perencanaan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa.

Dengan demikian, outcome dari pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang telah memberikan dampak jangka panjang yang cukup baik. Pembangunan infrastruktur meningkatkan aksesibilitas, menunjang kegiatan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup dan interaksi sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta belum meratanya pembangunan di seluruh dusun. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca juga memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, outcome pembangunan fisik di desa ini menunjukkan hasil yang positif, tetapi perlu ditingkatkan dari segi pemerataan dan keterlibatan masyarakat agar manfaatnya lebih optimal dan berkelanjutan.

Rekomendasi dalam penelitian sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah desa disarankan untuk lebih mengakomodasi keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik agar hasil pembangunan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil warga.
2. Pemerataan Pembangunan Antar Dusun, Pemerintah desa perlu memperhatikan keadilan distribusi pembangunan fisik di seluruh wilayah desa, khususnya di dusun-dusun yang belum tersentuh pembangunan secara optimal.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Transparansi, Kegiatan pembangunan sebaiknya disosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat memahami tujuan, proses, dan manfaatnya, serta dapat berperan aktif dalam pengawasan.
4. Pemberdayaan Kapasitas Pengawasan Masyarakat, Diperlukan pelatihan atau pendampingan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keberanian dalam mengawasi jalannya pembangunan secara objektif.
5. Antisipasi Hambatan Teknis, Pemerintah desa perlu menyusun strategi mitigasi terhadap hambatan seperti cuaca atau kenaikan harga bahan bangunan agar jadwal dan kualitas pembangunan tetap terjaga. Perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat mencapai target pelayanan Kartu Keluarga digital (barcode) yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran dan

pemahaman masyarakat, kendala teknis, dan keterbatasan sumber daya manusia atau infrastruktur perlu diperhatikan agar target tersebut dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, A., & Mulyono, D. (2021). Pengaruh kualitas jasa dan harga terhadap kepuasan pelanggan Cengkareng Golf Club. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 22–32.
- Hazami, M., & Mulyono, D. (2023). Kinerja pemerintahan desa dalam pelayanan publik di bidang kependudukan: Studi Desa Gempol Saru Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 982–1001.
- Kamaludin, K., & Mulyono, D. (2023). Optimalisasi tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1069–1081.
- Kurniawan, E., & Mulyono, D. (2023). Analisis pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Tangerang Selatan dalam menangani kebakaran di Kota Tangerang Selatan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Sciences*.
- Mirwandi, O., & Mulyono, D. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanganan sampah (Studi UPT Wilayah Timur). *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1042–1056.
- Moekijat. (2002). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, D. (2021). Tingkat preferensi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Cipondoh Makmur. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 1(1), 23–29.
- Mulyono, D., Supriadi, Y. N., & Hermawanto, A. R. (2020). Model analisis pengawasan BPD dan dampaknya pada transparansi keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Tangerang dengan kinerja perangkat desa sebagai variabel moderasi. *Jurnal Mozaik*, XII, 1–12.
- Permana, R. S., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi penjualan di PT. Edita Putra Perkasa. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1002–1016.
- Pirani, I. S., Gustiana, R., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Analisis implementasi sistem pengupahan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Enlka Mitra Perkasa. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1029–1041.
- R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung :Alumni, 2010),
- Rahardjo Adisasmita, Pembentukan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Rahardjo Adisasmita. 2005. Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yogyakarta : Graha Ilmu,

- Rivani Alfinita S., Analisis "Job Description" Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, Universitas Hasanuddin . 2012
- Rohim, M. I., Mulyono, D., & Saragih, G. S. (2023). Pengelolaan ketertiban Pasar Curug Kabupaten Tangerang oleh Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1057–1068.
- Rusdiana. (2017). Manajemen Evaluasi Program Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saifullah, S., & Mulyono, D. (2024). Implementation of Annex 17 concerning aviation security and safety supervision by Aviation Security Soekarno Hatta Airport Cengkareng Jakarta. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 89–96.
- Saldi, N. W., & Mulyono, D. (2023). Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tangerang (Studi pada daya tarik wisata Kota Tangerang). Artikel, 1–14.
- Sutoro, S., Subagia, D., & Mulyono, D. (2023). Efektifitas pelayanan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama dalam program BPJS di Puskesmas Karawaci Baru. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(3), 1017–1028.
- Siagian, Sondang P. 2009. Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihasimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. IN MEDIA
- Singarimbun, Masri. 2006. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Siti hartina aprilia, noviakencana, doris febriyanti (2016) Peran kepala desa untuk mewujudkan swadaya masyarakat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa studi pada kasus didesa cinta damai kecamatan sungai lilin musi banyuasin, volume 2 No.1 tahun 2016
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono, Ag,2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Subarsono, A. G. (2009). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi. (2005). Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta
- Widyawati, T. I., Karlinah, I., Aditya, T., & Mulyono, D. (2021). Inovasi pengelolaan sampah terpadu di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5(1), 82–86.